

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Kota Batu dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Kota Batu telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian pada seluruh indikator yang menunjukkan hasil yang sangat positif dalam pelaksanaan kebijakan Program Jatim Puspa di Kota Batu.

Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Merilee S. Grindle dalam Anggara (2014) dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Isi Kebijakan (Content of Policy)

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program. Adanya Program Jatim Puspa di Kota Batu memberikan keuntungan berbagai pihak seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pemerintah Desa, DP3AP2KB Kota Batu dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan Program Jatim Puspa di Kota Batu memberikan manfaat pada banyak pihak karena mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat. Namun, terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menolak untuk membuka usaha karena kendala lokasi dan usia Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Jangkauan perubahan yang diinginkan. Implementasi Program Jatim Puspa telah menunjukkan kesesuaian dan dapat dikatakan telah mencapai jangkauan yang

diinginkan yaitu peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kemandirian usaha.

4. Kedudukan pengambil keputusan. Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Kota Batu Tahun 2021-2022 tidak ada kendala yang terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan jelas dan tertata serta telah dilakukan sosialisasi bagi pelaksana program sehingga pelaksana program paham dengan kebijakan yang dilaksanakan.
5. Pelaksana program. Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Kota Batu telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan serta didukung oleh pelaksana program yang kompeten dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
6. Sumber daya yang disediakan. Sumber daya seperti anggaran dan fasilitas pada Program Jatim Puspa di Kota Batu telah tersedia dengan baik dari instansi pelaksana program sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa terbantu.
7. Indikator Isi Kebijakan pada implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Kota Batu telah berjalan dengan baik. Beberapa poin indikator Isi Kebijakan yaitu kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, jenis manfaat yang dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang disediakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti penolakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena kendala usia maupun dan lokasi untuk membuka usaha.

B. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Tidak ada strategi yang pasti dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa karena semua kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun kekuasaan pada aktor yang terlibat memiliki pengaruh yang kuat dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Karakteristik lembaga dan penguasa. Pelaksana program sudah melakukan tugasnya dengan baik karena tidak ada konflik yang terjadi pada 6 (enam) Desa dengan instansi pelaksana program, pemahaman yang diterima juga sangat baik sehingga implementasi program berhasil dilakukan.
3. Kepatuhan dan daya tanggap. Kepatuhan dan ketanggapan para implementor sudah dilakukan dengan sangat baik dan cukup responsif serta sangat membantu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Indikator Konteks Implementasi pada implementasi kebijakan Program Jatim Puspa di Kota Batu telah berjalan dengan baik. Beberapa poin indikator tersebut yakni kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya strategi analisis khusus mengenai pelaksanaan Program Jatim Puspa agar tujuan sasaran yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.
2. Adanya survei keberlangsungan usaha masyarakat KPM agar bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan dan dapat menunjang usaha masyarakat.